

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan dalam Negara maju, Negara berkembang bahkan Negara terbelakang sekalipun. Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, BAB II Pasal 3 Ayat 1 disebutkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam proses pembangunan, masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi secara menerus sebagai satu daur, ini biasa disebut

daur pembangunan partisipatif. Yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang kelurahan pasal 12 ayat 4 yang berbunyi penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan, di mana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi, namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan dan pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mendasari pada ketentuan masyarakat setempat serta didukung peran serta aktif masyarakat dari awal pengidentifikasian masalah sehingga tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan akan tepat sasaran, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintah yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mempunyai sifat sangat penting:

1. Masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sementara masalah partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan belum maksimal. Untuk itu peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sangat diperlukan. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbang input maupun dalam hasilnya. Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang disebut dengan Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan). Dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kelurahan, pemerintah wajib menyelenggarakan musrembang di tingkat Kelurahan

Sebagai salah satu Kelurahan di Kota Kupang, Kelurahan Penfui juga melakukan musrembang di tingkat Kelurahan. Kelurahan Penfui adalah salah satu Kelurahan di Kota Kupang yang merupakan perubahan status dari Desa Penfui. Dahulu Desa Penfui merupakan bagian dari Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Kelurahan Penfui dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 September 1980 Nomor : 140-502 tentang Pembentukan Desa menjadi Kelurahan. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1996 Tanggal 25 April 1996 tentang peningkatan Status Kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Kupang termasuk didalamnya Desa Penfui di tingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.

Adapun luas dari wilayah Kelurahan Penfui adalah  $\pm$  13,2 Km, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baumata, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Naimata, dan Kelurahan Liliba, Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Liliba, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oeltua

Keadaan Penduduk Kelurahan Penfui Per-31 Agustus 2022 sebanyak : 6902 Jiwa, Laki-laki: 3536 Jiwa, Perempuan: 3325 Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK):1023. Dengan jumlah masyarakat yang bisa dibayangkan sangat banyak ini sangat bagus jika masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan agar pembangunan di kelurahan penfui dapat mencapai hasil yang diinginkan.

**Tabel 1.1 Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang**

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan			
No	Tahun	Peserta yang diundang	Peserta yang hadir
1	2020	70 orang	52 Orang
2	2021	70 orang	50 Orang
3	2022	70 orang	48 Orang

*Sumber : data kelurahan penfui (2020-2022)*

Dilihat dari data yang ada keterlibatan masyarakat di Kelurahan Penfui dalam berpartisipasi atas pembangunan Kelurahan, terutama terlihat dari berbagai kegiatan seperti rapat musrembang di atas, partisipasi masyarakat masih sangat kurang. Bahkan dari data dokumen rapat dalam pertemuan musrembang Kelurahan, dapat dilihat bahwa antusiasme tokoh masyarakat yang diundang dalam musrembang masih sangat kurang. Ditambah hasil pengamatan penulis

selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kelurahan Penfui bulan oktober tahun 2020 dalam kegiatan kerja bakti mingguan, masyarakat kurang berpartisipasi. Hanya beberapa masyarakat saja yang ikut berkerja bersama lurah dan pegawai lurah lainnya. Seharusnya partisipasi baik ide tenaga serta keahlian dari tokoh masyarakat yang mengikut rapat dan kerja bakti mingguan tersebut sangat diharapkan agar dalam pembangunan kedepannya tersebut lebih efisien dan efektif dari segi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana **Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang?**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada Latar Belakang Masalah di atas, maka permasalahan pokok yang ingin diteliti adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

### 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi di dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional Khususnya di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama dimasa depan sebagai bagian dari usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

### 2) Manfaat praktis

1) Bagi masyarakat penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

2) Hasil penelitian ini dapat memberi informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis dan dapat memperkaya referensi yang telah ada.